

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Sidenreng Rappang bukanlah akhir dari segalanya. LAKIP akan menunjukkan hasil jika capaian yang dihasilkan telah selaras dan bersinergi dengan apa yang dicanangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

LKj-IP akan menunjukkan hasil jika pertanggung jawaban ini dapat diterima oleh stakeholder termasuk masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang padanya umumnya. LKj-IP akan memberikan manfaat jika masyarakat dapat mengerti akan makna yang terkandung didalamnya.

Tujuan Penyusunan LKj-IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui Penyusunan LKj-IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Walaupun masih terdapat kekurangan terutama dalam membangun sistem informasi untuk menilai indikator kinerja, kami akan terus lanjutkan semua tugas yang diamanahkan untuk menggapai visi kedepan.

Kami menyakini bahwa eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sangat tergantung pada bagaimana mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah diamanahkan publik kepada organisasi. Sehingga, penerbitan LKj-IP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang ini, diharapkan akan

memberikan nuansa baru bagi penyelenggaraan aktivitas organisasi, khususnya bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019

KEPALA DPMDPPA,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP.19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar isi	IV
Daftar Lampiran	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
a. Menurut Golongan.....	5
b. Menurut Jabatan/Eselon dan staf.....	5
c. Menurut Tingkat Pendidikan.....	6
d. Menurut Jenis Kelamin.....	6
C. Fungsi Strategis.....	9
D. Permasalahan Utama.....	9
E. Maksud dan Tujuan LKj-IP.....	10
BAB II PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi kelembagaan masyarakat.....	16
2. Meningkatnya Kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.....	22
3. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan.....	25
4. Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.....	30

5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.....	34
B. Realisasi Anggaran.....	37
BAB IV PENUTUP.....	44
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....	44
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa mendatang.....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Tabel Rencana Strategis (RS)
2. Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
4. Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap

anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) untuk tahun anggaran 2018 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 45 Tahun 2016 sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1. Sub.bag Perencanaan
 - 2. Sub.bag Keuangan
 - 3. Sub.bag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Bina Pemerintahan desa
 - 1. Seksi Penataan Desa dan Kelembagaan Pemerintah Desa
 - 2. Seksi Keuangan dan Aset Desa
 - 3. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Desa
- d. Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi Budaya Masyarakat
 - 1. Seksi Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
 - 2. Seksi Kelembagaan, Adat dan Budaya Masyarakat
 - 3. Seksi Ketahanan Masyarakat
- e. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa
 - 1. Seksi pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 - 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 3. Seksi Pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdesaan
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - 2. Seksi Perlindungan Anak
 - 3. Seksi Kualitas Keluarga

Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Merumuskan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan;
3. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
4. Menyusun kegiatan tahunan kantor sesuai kebijakan Bupati Sidenreng Rappang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Mengambil langkah-langkah kebijakan operasional dalam pelaksanaan tugas kedinasan sesuai kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pokok badan dapat berjalan;
6. Mengawasi atau mengecek setiap pelaksanaan tugas bawahan sekaligus memberikan petunjuk dan pembinaan agar tugas selesai tepat waktu dan terhindar dari kesalahan;
7. Melaksanakan koordinasi yang diperlukan dalam rangka kelancaran tugas;
8. Mengikuti rapat dan pertemuan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Kepala Dinas;
9. Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mencari langkah-langkah pemecahannya;
10. Menilai prestasi dan semangat pengabdian aparat bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan aparat untuk pembinaan karier.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh Aparatur Sipil Negara sejumlah 38 orang ASN dengan rincian sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

UNIT KERJA	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretariat	1	8	2	11
Bidang Bina Pemerintahan Desa	1	5	-	6
Bidang Kelembagaan & Sosial Budaya Masyarakat	2	5	-	7
Bidang Pembangunan & Usaha Ekonomi Desa	1	4	1	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1	3	1	5
TOTAL	7	27	4	38

b. Menurut Jabatan/Eselon dan Staf

UNIT KERJA	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	-	-	1
Sekretariat		1	3	7	11
Bidang Bina Pemerintahan Desa		1	3	2	6
Bidang Kelembagaan & Sosial Budaya Masyarakat		1	2	3	6
Bidang Pembangunan & Usaha Ekonomi Desa		1	2	3	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		1	2	3	6
TOTAL	1	5	12	18	38

c. Menurut Tingkat Pendidikan

UNIT KERJA	PASCA SARJANA	SARJAN A	SARJAN A MUDA	SMA/ SMP	TOTAL
Kepala Dinas		1	-	-	1
Sekretariat	2	6	-	3	11
Bidang Bina Pemerintahan Desa	1	5	-	-	6
Bidang Kelembagaan & Sosial Budaya Masyarakat	4	3	-	-	7
Bidang Pembangunan & Usaha Ekonomi Desa	2	3	-	1	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1	4	-	2	7
TOTAL	10	22	-	6	38

d. Menurut Jenis Kelamin

UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretariat	5	6	11
Bidang Bina Pemerintahan Desa	4	2	6
Bidang Kelembagaan & Sosial Budaya Masyarakat	4	3	7
Bidang Pembangunan & Usaha Ekonomi Desa	-	6	6
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	1	6	7
TOTAL	15	23	38

Sementara untuk mendukung Tupoksi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh sarana dan prasarana terdiri dari :

No. Urut	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Gedung	-	1	Baik
2.	Mobil	Toyota	1	Baik
		Daihatsu	1	Baik
		Luxio	1	Baik
		Avanza	1	Baik
3.	Motor	Honda	1	Rusak Berat
4.	Motor	Arashi	1	Kurang Baik
5.	Motor	Shogun	5	Baik
6.	Motor	Revo	2	Baik
7.	Motor	Vario	2	Baik
8.	Alat Kantor Lainnya	Aluminium	2	Baik
9.	Lemari Kayu		3	Baik
10.	Meja Tambahan		4	Baik
11.	Kursi Rapat		42	Baik
12.	Kursi Tamu		2	1 Kurang Baik/1 Baik
13.	Kursi Putar	Zeppelin Staff Chair Black	30	Baik
14.	Meja Biro		9	6 Baik/ 3 Rusak Berat
15.	Gordyn		1	Baik
16.	AC Split 2 PK	Panasonic	1	Baik
17.	AC Split 2 PK	Panasonic	2	Baik
18.	P.C Unit/ Komputer PC	LG	1	Baik
19.	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	4	Baik
			3	Rusak Berat
20.	P.C Unit/ Komputer PC	Komputer PC	2	Baik
21.	Laptop	Toshiba	2	1 Baik/ 1 Rusak Berat
22.	Laptop		1	Baik

23.	Laptop	HP	1 1	Baik Rusak Berat
24.	Laptop	Asus	1	Baik
25.	Laptop	Apple	1	Baik
26.	Notebook	Soni	1	Baik
27.	Printer	Office Jet/HP	1	Baik
22.	Server		2	Baik
23.	Radio Access Point		1	Baik
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II		2	Baik
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal	1	Kurang Baik
26.	Meja Kerja	Lokal	10	1 Rusak Berat/10 Baik
27.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Meeting TBL2412	1	Rusak Berat
28.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain		2	Baik
29.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Florian	1	Rusak Berat
30.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal	5	Baik
31.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	Lokal	1	Kurang Baik
33.	Kursi Hadap Depan meja Kerja Pejabat Eselon II	London	2	Baik
34.	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	Melca Credenza	1	Baik
35.	Proyektor + Attachment	Viewsino	1	Baik
36.	Proyektor + Attachment	Soni	1	Baik
37.	Microphone/Wireless Mic	Crazt	1	Baik
38.	Facsimile	Panasonic	1	Baik
39.	Pompa Air	-	1	Baik
40.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	47 Desa	47	Baik
41.	Konstruksi Pagar		1	Baik
42.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro		1	Baik
43.	Portable Water Pump		1	Baik

C. Fungsi Strategis

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum memiliki Fungsi Strategis yaitu: ***Untuk Mewujudkan kemandirian Masyarakat dan otonomi Desa berwawasan Gender dan Perlindungan Anak menuju Keluarga berkualitas Tahun 2018.***

Secara singkat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berfungsi:

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

D. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka Mewujudkan tugas dan fungsi daripada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk diselesaikan seperti masih tingginya angka kemiskinan, belum memadainya kualitas SDM aparatur pemerintah desa, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, rendahnya kualitas lembaga

kemasyarakatan yang ada di desa, dan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan lembaga kemasyarakatan;
2. Tingginya angka kemiskinan;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa;
5. Rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
6. Rendahnya kapasitas aparat pemerintah desa;
7. Kurangnya pengembangan pasar desa;
8. Masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak;
9. Masih rendahnya tingkat keberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga.

E. Maksud dan Tujuan LKJ-IP

a. Maksud

Penyusunan LKj-IP dimaksudkan untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKj IP ini kredibilitas OPD ini diharapkan dapat lebih baik di mata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan perencanaan diberbagai bidang termasuk perencanaan penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj-IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan OPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2018). Penyusunan LKj-IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi guna perbaikan kinerja OPD dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap Organisasi Perangkat Daerah, LKj-IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj-IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategic (*strategic planning*) yang diterapkan melalui rencana strategis OPD dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perencanaan strategis (*strategic planning*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang " Mewujudkan kemandirian masyarakat dan otonomi Desa berbasis kearifan lokal " yang meliputi:

1. Memberdayakan masyarakat dan pemerintah desa.
2. Menanggulangi kemiskinan.
3. Memperbaiki fungsi legislasi desa
4. Membangun sinergitas program pemberdayaan masyarakat dengan provinsi dan pusat.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada

pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan OPD dalam bentuk rencana induk (*master plan*) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan berbagai indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan 9 program 37 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang (DPA/DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak) sebesar Rp. 6.675.017.000.00,- (Enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh belas ribu rupiah,-), yang selanjutnya berkurang menjadi Rp 6.043.464.000,00,- (Enam miliar empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah,-) dalam APBD Perubahan Tahun 2018 dalam hal Belanja Tidak Langsung Khusus Gaji sebesar Rp. 2.608.188.000.00,- (Dua miliar enam ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah,-) pada APBD awal dan menjadi Rp. 2.488.188.000.00,- (Dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah,-) pada APBD perubahan tahun 2018. Sedangkan pada Belanja Langsung pada tahun 2018 berkurang sebesar Rp. 511.553.000.00,- (Lima ratus sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu

rupiah,-) dimana pada APBD awal sebesar Rp. 4.066.829.000.00,- (Empat miliar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah,-) menjadi Rp. 3.555.276.000.00,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah,-).

Adapun secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018, secara lengkap terurai pada Lampiran I.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan program kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (*feedback*) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat	Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	100	100	100
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	100
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	%	100	100	100
	Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	%	100	100	100
	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	%	100	99.55	99.55
Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan	%	100	94.93	94.93

dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	gender 55.56%				
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	100	100

Pada tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Rencana Strategis Tahun 2014 – 2018 ada sebanyak 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan berdasarkan revisi RPJMD pada tahun 2014 – 2018 ini yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat

Analisis capaian **Sasaran 1:** Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat	Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	100	100	100
Rata – rata capaian (%)					100

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari indikator kinerja utama yang mendukung sasaran strategis ini, telah mencapai target sebesar 100 persen dari daripada target pada akhir tahun RPJMD Kabupaten Sidenreng rappang.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2016	2017	2018
1	Persentase desa yang berstatus swakarsa	28	22	22
Rata-rata Capaian (%)		28	22	22

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun menurun yaitu tahun 2016 sebesar 28 persen, tahun 2017 sebesar 22 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 22 persen. Namun dengan terealisasinya target 22 persen pada tahun 2018 maka target pada akhir tahun RPJMD tahun 2018 telah tercapai 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase desa yang berstatus swakarsa	%	100	100	100
Rata-rata Capaian (%)				100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 1 telah mencapai target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) sebesar 100 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini didukung dengan adanya biaya operasional yang anggarannya bersumber dari APBD.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebesar Rp 260.000.000,- dan pada APBD awal sebesar Rp 589.000.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp 749.000.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 741.134.600,- atau sebesar 98.95 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebanyak 1 program dan 6 kegiatan, yaitu: program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan yaitu : Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, Monitoring, evaluasi dan pelaporan, PNPM, Sosialisasi pedoman ADD, Penguatan kelembagaan

masyarakat desa dan kelurahan, Rapat koordinasi kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan, Pelatihan bagi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan LKMD.

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa

Analisis capaian **Sasaran 2** : Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	100	100
Rata – rata capaian (%)					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2018 hanya terealisasi sebesar 100 persen dari target capaian pada akhir tahun perencanaan (akhir periode RPJMD kabupaten sidenreng rappang).

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2016	2017	2018
1	Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	99.6	99.89	100
Rata-rata Capaian (%)		99.6	99.89	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2016 sebesar 99.6 persen, tahun 2017 sebesar 99,89 persen dan pada tahun 2018 sebesar 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Jumlah aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitasnya	%	100	96	96
Rata-rata Capaian (%)				96

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 2 telah mencapai target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) target tersebut dapat dicapai secara optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini didukung dengan adanya biaya operasional yang anggarannya bersumber dari APBD tahun 2015, APBD 2016, APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini adalah sebesar Rp 1.865.909.000,- dan pada APBD awal sebesar Rp 1.865.909.000.000,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp 844.744.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 426.484.124,- atau 50,49 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa ini

adalah sebanyak 1 program dan 4 kegiatan, yaitu: program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan yang terdiri dari kegiatan yaitu : Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat, Pembinaan dan fasilitasi POKJA dan PKK desa dan kelurahan, Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan POKMAS pengelolaan air bersih dan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat (KPM D/K).

3. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan

Analisis capaian **Sasaran 3** : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	Persen	100	99.43	99.43
	Partisipasi angkatan kerja perempuan = 97,14%	Persen	100	100	100
	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG 20%	Persen	100	99.55	99.55
	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 55.56%	Persen	100	94.93	94.93
Rata – rata capaian (%)					74.49

Pada tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa untuk mencapai sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk

mendukung pencapaian sasaran yang telah ditentukan pada tahun 2018. Namun keempat indikator tersebut merupakan satu kesatuan untuk mencapai sasaran strategis.

- b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2016	2017	2018
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	11.43	99.43	100
2	Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	-	94.93	96
3	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	16	99.55	100
4	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	-	94.93	100
Rata-rata Capaian (%)		-	97.21	100

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun tahun 2016 realisasi sebesar 0 persen, namun pada tahun 2017 terealisasi sebesar 94.93 persen dan di tahun 2018 target pencapaiannya sudah 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah = 13,30%	%	100%	99.43	99.43
Partisipasi angka kerja perempuan = 97,14%	%	100%	94.93	94.93
Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	%	100%	99.55	99.55
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100%	94.93	94.93
Rata-rata Capaian (%)				97.21

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja sampai pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 97.21.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2017 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 94.93 persen. Diharapkan pada tahun 2018 capaian target 100 persen pada RPJMD kabupaten sidenreng rapping dapat direalisasikan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan adalah sebesar Rp. 88.500.000,- setelah perubahan anggaran bertambah menjadi Rp. 123.200.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 74.537.500,- atau 60,50 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas, responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan ini adalah sebanyak 4 program dan 11 kegiatan, yaitu: program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan 10 kegiatan.

4. Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan

Analisis capaian **Sasaran 4** : Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100	100	100
Rata – rata capaian (%)					100

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 100 persen dari target capaian pada akhir tahun perencanaan (akhir periode RPJMD kabupaten sidenreng rapping) tahun 2018.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2016	2017	2018
1	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	-	100	100
Rata-rata Capaian (%)			100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun menurun yaitu tahun 2016 sebesar 0 persen, tahun 2017 sebesar 100 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target pada akhir perencanaan atau pada akhir RPJMD kabupaten sidenreng rapping telah tercapai.

- c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	%	100	100	100
Rata-rata Capaian (%)				100

Jika melihat realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 4 telah mencapai target jangka menengah hingga tahun 2018 (tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang) sebesar 100 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2018 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target 100 persen pada RPJMD kabupaten sidenreng rappang dapat direalisasikan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat ini adalah sebesar Rp 196.715.000,- (tidak terjadi perubahan anggaran di APBD perubahan) dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 158.741.866,- atau sebesar 80.69 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pemberantasan buta aksara ini adalah sebanyak 1 program yaitu Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan dan 3 kegiatan, yaitu: Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dan evaluasi pelaksanaan PUG.

5. Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak

Analisis capaian **Sasaran 5** : Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	96	99
Rata – rata capaian (%)					99

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, pencapaian indikator kinerja utama pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 99 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja		Capaian (%)		
		2016	2017	2018
1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	-	96	99
Rata-rata Capaian (%)			96	99

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir maka secara umum rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat dari tahun ke tahun yaitu tahun 2016 sebesar 0 persen, tahun 2017 sebesar 96 persen, dan pada tahun 2018 sebesar 99 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada akhir priode RPJMD	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, rasio KDRT = 0,01	%	100	99	99
Rata-rata Capaian (%)				99

Jika melihat realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator kinerja sasaran 5 telah mencapai target jangka menengah hingga 99 persen.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator yang mencapai target ini ditunjang oleh anggaran yang memadai pada tahun 2017 sehingga indikator dapat terealisasi sebesar 96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian target pada RPJMD kabupaten sidenreng rappang dapat dicapai.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak ini adalah sebesar Rp. 115.462.500,- setelah perubahan anggaran berkurang menjadi Rp. 98.062.500,- dan dari anggaran tersebut tidak ada terealisasi.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pemberantasan buta aksara ini adalah sebanyak 1 program yaitu Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak dan 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.043.464.000, Belanja Langsung sebesar Rp. 3.555.276.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.488.188.000, anggaran tersebut bersumber dari 100% APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.115.426.472,- atau 100% informasi dari total pagu anggaran Rp. 6.043.464.000. Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 928.037.528,- atau 17% (*lihat : Lampiran 2*) Mengenai kinerja dalam hubungannya dengan tujuan dan

sasaran. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang diukur menurut pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Komposisi realisasi anggaran pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.703.544.034,-

2. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.411.882.438,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (Per Program) sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN KEUANGAN PER PROGRAM			
		PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	750.702.500,-	628.680.244,-	83,7
2	Meningkatnya Mutu, Volume dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67.820.000,-	23.830.000,-	35,1
3	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Laporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000,-	18.500.000,-	100
4	Status pelayanan kabupaten terhadap anak (kab.layak anak)	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	123.200.000,-	74.537.500,-	60,5

5	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.	844.744.000,-	563.769.124,-	66,7
6	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	77.115.000,-	16.202.500,-	21
7	Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	196.715.000,-	158.741.866,-	80,6
8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.	98.062.500,-	0,-	0,0
9	Rumah Tangga Miskin.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.	749.000.000,-	741.134.600,-	98,9
10	Pemerintah Desa dan BPD	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.	41.499.500,-	31.648.700,-	76,2
11	% Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah, % Partisipasi perempuan di lembaga swasta, %Partisipasi angkatan kerja perempuan, %SKPD yang menerapkan PPRG.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	587.917.500,-	446.499.500,-	75,9
TOTAL			3.555.276.000,-	2.703.544.034,-	76%

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (Per Kegiatan) sebagai berikut :

NO	SASARAN	CAPAIAN KEUANGAN PER KEGIATAN			
		KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Tersedianya Pelengkap Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,-	900.000,-	100
2	Jasa Rekening Listrik Terbayar tepat waktu	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000,-	30.228.240,-	58,6
3	Tersedianya Jasa Jaminan Milik Daerah.	Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah.	20.000.000,-	19.703.100,-	98,5
4	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.000.000,-	3.396.590,-	89,9
5	Terbayarnya Honor Pegawai Negeri Sipil	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	105.793.000,-	105.793.000,-	100
6	Terbayarnya Jasa Cleaning Service	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	21.960.000,-	20.576.000,-	93,7
7	Tersedianya kebutuhan koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	282.732.500,-	204.815.064,-	72,4
8	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10.000.000,-	9.969.500,-	99,6
9	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran dan Jasa Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.717.000,-	233.298.750,-	92,6
10	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.600.000,-	11.600.000,-	53,7

11	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	21.220.000,-	12.230.000,-	57,6
12	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000,-	0,-	0,0
13	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.500.000,-	18.500.000,-	100
14	Meningkatnya pemahaman tentang perlindungan anak	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan keseraraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	75.000.000,-	74.537.500,-	99,3
15	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	48.200.000,-	0,-	0,0
16	Kelompok Masyarakat Miskin	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat	140.000.000,-	139.850.000,-	99,8
17	Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi pokja dan kelompok PKK di desa/kelurahan.	Pembinaan dan fasilitasi Pokja dan PKK desa dan kelurahan.	413.829.000,-	238.874.124,-	57,7
18	Terlaksananya Pembinaan Fasilitas kelenbagaan Pokmas pengelolaan air bersih	Pembinaan fasilitas kelenbagaan POKMAS pengelolaan air bersih	140.915.000,-	35.195.000,-	24,9
19	Meningkatnya Pengetahuan Kader Teknis di Desa	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	150.000.000,-	149.850.000,-	99,9
20	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	33.115.000,-	12.565.000,-	37,9
21	Terwujudnya Kelembagaan BUMDES	Pembinaan dan Fasilitasi BUMDES	44.000.000,-	3.637.500,-	8,2
22	Terselesaikannya permasalahan yang di hadapi masyarakat yang dilaporkan ke P2TP2A	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	132.000.000,-	129.736.366,-	98,2

23	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemeberdayaan perempuan dan anak	10.000.000,-	10.000.000,-	100
24	Tersedianya data dan pelaksanaan PUG	Evaluasi Pelaksanaan PUG	54.715.000,-	19.005.500,-	34,7
25	Terlaksananya kebijakan perlindungan perempuan di kab. sidrap	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	98.062.500,-	0,-	0,0
26	Meningkatnya Kualitas SDM Kader Desa	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	95.000.000,-	93.768.800,-	98,7
27	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Aparat Desa	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	106.500.000,-	105.981.000,-	99,9
28	Terselenggaranya sosialisasi pedoman pengelolaan ADD	Sosialisasi pedoman pengelolaan ADD.	77.500.000,-	77.330.000,-	99,8
29	Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	260.000.000,-	254.279.800,-	97,8
30	Terlaksananya Koordinasi Masyarakat Desa & Kelurahan	Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.000.000,-	59.925.000,-	99,9
31	Terwujudnya Pelatihan Bagi Pengurus LPM & LKMD	Pelatihan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD	150.000.000,-	149.850.000,-	99,9
32	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	41.499.500,-	31.648.700,-	76,3
33	Terlaksananya kerjasama dengan organisasi perempuan	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	359.917.500,-	260.000.000,-	72,2
34	Tersesialisinya kesetaraan dan keadilan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	190.000.000,-	186.499.500,-	98,6

35	Tersedianya fasilitasi manajemen dan pengembangan usaha bagi perempuan	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	38.000.000,-	0,-	0,0
TOTAL			3.555.276.000,-	2.703.544.034,-	76%

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa prosentase penyerapan anggaran pada tahun 2018 sebesar 76% dari target yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2018.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) koordinator yang memiliki tugas pokok untuk menyusun perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi. Pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Aparatur, sumber dana, sarana dan prasarana yang representative.

Memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dikarenakan rata-rata target Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis (PPS) dicapai 62%, dengan rincian per sasaran : Sasaran Strategis 1 tercapai 74.73%, Sasaran Strategis 2 tercapai 100% dan Sasaran Strategis 3 tercapai 100%, Sasaran ke 4 tercapai 99.89%.
2. Realisasi Anggaran sebesar Rp. 5.115.426.472 (84,64%) dari Pagu Anggaran tahun 2018 Rp. 6.043.464.000, _

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sesuai penegasan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Instansi Pemerintah setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang ditempuh dan dilimpahkan kepadanya dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disingkat LKj-IP untuk disampaikan kepada pimpinan pemerintahan sesuai tingkatannya.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang terencana dan terarah serta sinergi dan berkesinambungan melalui rencana aksi daerah sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN Tahun 2011-2015, agar masing-masing lembaga melaksanakan tugasnya secara sinergis.
2. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan atas pelaksanaan kegiatan.
3. Peningkatan fasilitas dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memaksimalkan Program di bidang Bina Pemerintahan desa, Pembangunan SDA & Usaha Ekonomi Desa, Kelembagaan dan Sosial

Budaya Masyarakat, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang, Sekian dan terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019

KEPALA DPMDPPA,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 TAHUN : 2018

NO	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA		REALISASI	(%)
			TARGET		
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	900.000	900.000	100%
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpon & Air	51.600.000	30.228.240	59%
		Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	20.000.000	19.703.100	99%
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	6.000.000	3.396.590	57%
		Tersedianya Administrasi Keuangan	105.793.000	105.793.000	100%
		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	21.960.000	20.576.000	94%
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	282.732.500	204.815.064	72%
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000	9.969.500	100%
		Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan Administrasi Perkantoran	251.717.000	233.298.750	93%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	21.600.000	11.600.000	54%
		tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	21.220.000	12.230.000	58%
		tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000	-	0%
3	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000	18.500.000	100%
4	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	140.000.000	139.850.000	100%
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi POKJA dan PKK Desa dan Kelurahan	413.829.000	238.874.124	58%
		Terselenggaranya Ppembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	140.915.000	35.195.000	25%
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM D/K)	150.000.000	149.850.000	100%
5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	95.000.000	93.768.800	99
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	106.500.000	105.981.000	100%
		Terselenggaranya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD bagi Aparatur Pemerintah Desa.	77.500.000	77.330.000	100%
		Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	260.000.000	254.279.800	98%
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.000.000	59.925.000	100%
		Terselenggaranya Pelatihan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD	150.000.000	149.850.000	99,9%
6	Keseserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anank dan Perempuan	Terlaksananya Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.000.000	74.537.500	99,4%
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	48.200.000	-	0,0%
7	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	132.000.000	129.736.366	98%
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	10.000.000	10.000.000	100%
		Evaluasi Pelaksanaan PUG	54.715.000	19.005.500	35%

1	2	3	4	5	6
8	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	98.062.500	-	0%
9	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	33.115.000	12.565.000	38%
		Terselenggaranya Pembinaan dan Fasilitasi BUMDES di Desa	44.000.000	3.637.500	8%
10	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	41.499.500	31.648.700	76%
11	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan organisasi Perempuan	359.917.500	260.000.000	72%
	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	190.000.000	186.499.500	98%
	% SKPD yang menerapkan PPRG	Terselenggaranya Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam membangun keluarga sejahtera	38.000.000	-	0%
			3.555.276.000	2.703.544.034	76,0%

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019
Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SKPD DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN : 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	900.000
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemakaian Listrik, Telpn & Air	51.600.000
		Tersedianya Jaminan Barang Milik Daerah	20.000.000
		Tersedianya Jasa Kebutuhan Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas	6.000.000
		Tersedianya Administrasi Keuangan	105.793.000
		Tersedianya Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	21.960.000
		Tersedianya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	282.732.500
		Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	10.000.000
		Tersedianya Kebutuhan akan Pelayanan administrasi Perkantoran	251.717.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	21.600.000
		Tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	21.220.000
		tercapainya prosentase rata-rata kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	25.000.000
3.	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan	18.500.000
4.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	140.000.000
		Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitas Pokja PKK Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	413.829.000
		Penguatan Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	140.915.000
		Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat (KPM)	150.000.000
5.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	33.115.000
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDES	44.000.000
6.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	95.000.000
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	106.500.000
		Terselenggaranya sosialisasi pedoman pengelolaan ADD	77.500.000
		Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	260.000.000
		Terlaksananya rapat koordinasi kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	60.000.000
		Terwujudnya peningkatan kapasitas pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat (LKMD/LPM)	150.000.000
7.	Keseserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Terlaksananya Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.000.000
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	48.200.000
8.	Meningkatnya Akses dan Keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan	Terselenggaranya Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	132.000.000
		Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak	10.000.000
		Tersedianya data dan informasi pelaksanaan PUG	54.715.000
9.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Terselenggaranya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	98.062.500
10.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terselenggaranya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	41.499.500
11.	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Terlaksananya Kerjasama dengan organisasi perempuan	359.917.500
	% Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	190.000.000
	% Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	Tersedianya Fasilitas bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan keluarga sejahtera	38.000.000
JUMLAH			3.555.276.000

Pangkajene Sidenreng , 31 Januari 2019
Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19691220 199009 1 002

RENCANA STRATEGIS (RS)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2018

No	TUJUAN	SASARAN		
		URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan administrasi perkantoran melalui terbinanya sistem perencanaan dan pengawasan kinerja aparatur	Terciptanya sistem kinerja aparatur pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kerja	Terwujudnya mekanisme pendukung kinerja perkantoran	Tertatanya Halaman Kantor dan Mobilitas Operasional Lancar	Optimalisasi Peralatan Pendukung Kinerja
3	Meningkatkan pelaksanaan Pengembangan Sistem pelaporan realisasi kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan SKPD	Terwujudnya laporan realisasi kinerja dan keuangan SKPD	Penataan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
4	Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kelompok Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Masyarakat
5	Mewujudkan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatakan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat
6	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Pengalokasian dana desa Yang sesuai dengan aturan yang ada	Penegasan otonomi desa
		PNPM	Terlaksananya Pembinaan Proyek	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
		Meningkatnya Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	Terselenggaranya Sosialisasi pedoman Pengelolaan ADD	Terwujudnya Pemerintahan yang baik
		Terlaksananya Penyusunan perda tentang Desa	Terlaksananya Penyusunan perda tentang desa	Terwujudnya Pemerintahan yang baik

1	2	3	4	5
7	Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya Kapasitas aparatur pemerintah desa	Tersedianya SDM Pemerintah Desa di 68 Desa	terwujudnya tertib administrasi pertanggung jawaban desa
		Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
		Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa	Terselenggaranya pelatihan dalam bidang manajemen pemerintah desa
		Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan desa
		Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang inventarisasi kekayaan dan aset desa
8	Mewujudkan Percepatan Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, baik penegakan hukum dan pengembangan kebijakan yang pro Gender, pro poor, pro job dan pro environment	Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Terselenggaranya Fasilitasi Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
		Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Terselenggaranya Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan & anak	Terselenggaranya Pemetaan potensi organisasi lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan & anak
		Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
		Evaluasi Pelaksanaan PUG	Tersedianya data pengarusutamaan Gender	Tersedianya data pengarusutamaan Gender secara lengkap

1	2	3	4	5
9	Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah	Terselenggaranya Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah	Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	Terselenggaranya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	
10	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
		Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terselenggaranya Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	
		Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terselenggaranya Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	
11	Mewujudkan Percepatan Reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, baik penegakan Supermasi Hukum dan Pengembangan Kebijakan yang Pro Gender, Pro Por, Pro Job dan Pro Environment	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Responsif Gender, Berpihak pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Nilai-nilai Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Status Pelayanan Kabupaten Terhadap Anak (kabupaten Layak Anak)	
12	Penyediaan Belanja Tidak Langsung	Gaji Tunjangan	Terlaksananya Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan
		Tambahan Penghasilan PNS	Terlaksananya Belanja Tidak Langsung Tambahan Penghasilan	Terealisasinya Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. DOLLA MANDO

Pangkajene Sidenreng, 31 Januari 2019

Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002

PROGRAM
6
Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD
peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak

6

Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan

Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan

Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2018

NO.	SASARAN				REALISASI	PROSENTASE	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		Pencapaian Target	RATA-RATA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat daerah	- Terpenuhinya sarana administrasi perkantoran melalui kegiatan surat menyurat - <i>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</i>	Lembar	200	200	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
2.	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik daerah	- Informasi dan komunikasi kator berjalan lancar melalui tersedianya alat komunikasi - <i>Meningkatnya kinerja aparatur dengan tersedianya jasa komunikasi dan memudahkan komunikasi dengan instansi lainnya</i>	Bulan	12	12	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
3.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Daerah	- Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas dan operasional - Memudahkan kegiatan kedinasan	Unit	4	4	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
4.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Daerah	- Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas dan operasional - Memudahkan kegiatan kedinasan	Unit	8	3	38	38
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terbayarnya Honor Pegawai - <i>Meningkatnya Kinerja dan Semangat Pegawai</i>	Laporan	12	12	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100

6.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tersedianya Bahan dan Alat Pembersih Serta Upah Claning Service dan Penjaga Taman - Kantor Menjadi Bersih dan Nyaman	Kali	12	12	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							62,8
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	- Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Seinstansi yang terkait - Teratasinya Permasalahan Setiap Kegiatan	Kegiatan	100	62,8	62,8	62,8
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							63
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	- Tersedianya administrasi Perkantoran dan jasa administrasi perkantoran - Memudahkan Pekerjaan kantor	Kegiatan	100	37	37	37
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							37
9	Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Jasa Administrasi perkantoran - memudahkan Pekerjaan Kantor	Bulan	12	12	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
10	Pembangunan Gedung Kantor	- Sarana dan Prasarana Aparatur - Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Paket	10	10	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor - Tercapainya Presentase rata-rata Kebutuhan	Unit/Set	1	0	0	0
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							0

12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	
		- Tercapainya Persentase Rata-Rata Kebutuhan Pengadaan Gedung Kantor						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								0
13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								0
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1	100	100	
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas Operasional						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
15	Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Buah	0	2	0	0	
		- Tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								0
16	Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Unit	-	-	-	-	
		- tercapainya Persentase Rata-rata Kebutuhan Pemeliharaan rutin/ Berkala Peralatan gedung Kantor						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								0

17	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	- <i>Terbayarnya honor tim penyusun LAKIP, RENSTRA, RENJA, RKA/RKAP, DPA/DPPA</i>	<i>Laporan</i>	4	4	100	100
		- <i>Laporan Capaian kinerja dan keuangan selesai tepat waktu</i>					
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
18	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- <i>Terwujudnya Status pelayanan kabupaten terhadap anak (Kab.layak anak)</i> 1. <i>Angka kematian Bayi (AKB)</i> 2. <i>Angka Kematian ibu (AKI)</i> 3. <i>Sekolah ramah anak(SRA)</i> 4. <i>Taman bermain anak (TBA)</i>	%	100	100	100	100
		- <i>Presentase jumlah tenaga kerja di bawah umur</i>					
		- <i>A. % Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</i>					
		- <i>B. % Partisipasi perempuan di lembaga swasta</i>					
		- <i>C. % Partisipasi angkatan kerja perempuan</i>					
- <i>D. % SKPD yang menerapkan PPRG</i>							
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
19	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	- <i>Terseleenggaranya Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis bagi masyarakat</i>	%	100	100	100	100
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
20	Pembinaan dan Fasilitasi POKJA, PKK, Desa dan Kelurahan	- <i>Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi POKJA dan PKK Desa / Kelurahan</i>	%	100	100	100	100
		- <i>Terwujudnya pembinaan dan fasilitasi POKJA, PKK, Desa/ Kelurahan</i>					
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
21	Pelatihan Keterampilan bagi masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam menjadi barang produksi	- <i>Kelembagaan Masyarakat Desa</i>	%	100	32,6	33	33
		- <i>Terwujudnya Kelembagaan masyarakat Desa Yang Mandiri</i>					
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							33

22	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	- Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih	%	100	100	100	100	
		- Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan POKMAS Pengelolaan Air Bersih						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
23	Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL	- Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL	%	100	100	100	100	
		- Terwujudnya Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kader/ POKJA/ AMPL						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
24	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	- Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan ke (P2TP2)	Kegiatan	100	100	100	100	
		- terselesaikannya Permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilaporkan ke (P2TP2)						
25	Pemetaan Potensi Organisasi lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Organisasi Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	
		- Tersedianya data Organisasi Lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan Anak						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
26	Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Lembaga Pengarusutamaan Gender dan anak di Kab. Sidrap	%	100	100	100	100	
		- Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
27	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	- Lembaga Pengarusutamaan Gender dan anak di Kab. Sidrap	%	100	100	100	100	
		- Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100

28	Evaluasi Pelaksanaan PUG	-	<i>Data dan Informasi Pelaksanaan PUG</i>	%	100	100	100	100	
		-	<i>Tersedianya data dan Informasi Pelaksanaan PUG</i>						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									100
29	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	-	<i>Terlaksananya Kebijakan perlindungan Perempuan di Kabupaten Sidrap</i>	%	100	95	95	95	
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									95
30	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	-	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan</i>	%	100	99	99	99	
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									99
31	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	-	<i>Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</i>	%	100	100	100	100	
		-	<i>Terwujudnya Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</i>						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									100
32	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	<i>Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada 68 Desa</i>	Desa	68	68	100	100	
		-	<i>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada 68 Desa</i>						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									100
33	PNPM	-	<i>Terselenggaranya Pembinaan Proyek PNPM</i>	Kecamatan	10	10	100	100	
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									100
34	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan ADD	-	<i>Terlaksananya 340 Aparat Desa yang Dilatih</i>	Orang	340	340	100	100	
		-	<i>Meningkatnya Kemampuan Aparat Desa</i>						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN									100

35	Penyusunan Perda Tentang Desa	- Tersedianya Perda tentang Desa	%	0	0	0	0	
		- Terwujudnya Penyusunan DRAP Rancangan Perda Tentang Desa						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
36	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	- Terlaksananya 204 Aparat pemerintah Desa yang Dilatih	%	100	100	100	100	
		- Meningkatnya Kemampuan Aparat Pemerintah Desa						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
37	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	- Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	%	100	100	100	100	
		- Terselenggaranya Partisipasi masyarakat di dalam membangun Desa						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
38	Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tersedianya Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang memadai	%	100	100	100	100	
		Terwujudnya Kelembagaan masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Mandiri						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
39	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa	%	100	100	100	100	
		Terwujudnya Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan Tentang Desa						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								100
40	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya kerjasama dengan organisasi perempuan	%	100	99	99	99	
		Terselenggaranya peningkatan akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan						
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN								99

41	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender	<i>Terwujudnya Kesetaraan Gender</i>	%	100	100	100	100
		<i>Terseleenggaranya Kegiatan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender</i>					
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
42	Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	<i>Tersedianya fasilitasi bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan Keluarga sejahtera</i>	Paket	1	1	100	100
		<i>Terlaksananya kegiatan fasilitasi bagi Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam meningkatkan Keluarga sejahtera</i>					
PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN							80,7

Pangkejene Sidenreng, 31 Januari 2019
Kepala Dinas,

PATAHANGI NURDIN, S. IP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19691220 199009 1 002

Mengetahui,
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

H. DOLLA MANDO

2.995,050

3.389